

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2010-2017

Zulkhan Chrisna Adi Setiawan

Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Yfkgr6yvvg@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis beberapa factor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode tahun 2010 hingga 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel dari tahun 2010 hingga 2017 dengan sample penelitian sebanyak 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menjadi basis penelitian. Model panel yang digunakan dalam penelitian analisis ini adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan Eviews. Model Regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini sudah di uji asumsi klasik, terdeteksi tidak terkena multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi secara normal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan, Upah Minimum Provinsi berpengaruh negative dan signifikan terhadap Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Anggaran, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk.

ABSTRACT

This study analyzes several factors that affect poverty levels in Lampung Province in the period 2010 to 2017. The data used in this study are panel data from 2010 to 2017 with a sample of 9 regencies / cities in Lampung Province as a research base. The panel model used in this analytical research is the Fixed Effect Model (FEM) using Eviews. The panel regression model used in this study has been tested for classical assumptions, detected not affected by multicollinearity, heteroscedasticity, and normally distributed data. The results of this thesis show that Government Expenditure in Health has a negative and significant effect on Poverty, Government Expenditure in Education has a negative and significant effect on Poverty, Provincial Minimum Wages have a negative and significant effect on Poverty, and the Population Number has a positive and insignificant effect on Poverty.

Keywords: Poverty, budget, minimum wage and Population.

PENDAHULUAN

Pada suatu negara yang pembangunannya bisa di katakan berhasil salah satunya di tentukan oleh kemampuan pemerintahan dalam mengurangi atau meminimalisir tingkat kemiskinan di

negara tersebut. Di negara maju sendiri masih terdapat jumlah penduduk yang miskin. Namun dibanding dengan negara berkembang angka kemiskinan sangatlah sulit untuk maju karena ada kesamaan pada tingkat pendapatan nasional yang laju pertumbuhan ekonominya lambat.

Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh dunia. Masalah kemiskinan ini tidak hanya di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto,2014).

Adapun kemiskinan menurut pandangan islam yang termasuk dalam surat QS. Ar – Rum [30/84] :38 yang berbunyi:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, papan, dan sandang serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Kurniawan, 2018). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh (Nata dan Ningrum, 2015).

Di Indonesia yang masih di bilang negara berkembang dan memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak luput dari kemiskinan tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin masih banyak tertinggal dari segi pengetahuan dan teknologi khususnya di daerah-daerah desa yang masih sulit terjangkau oleh akses ke kota. Salah satu daerah Indonesia yang banyak tingkat kemiskinan terdapat di Kabupaten dan kota pada Provinsi Lampung.

Secara umum tujuan dalam studi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan perbedaan kesempatan untuk mengumpulkan basis kekuasaansosial mencakup: kapital yang produktif atau asset, asal-sumber keuangan, organisasi politik dan social yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan Bersama, jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain sebagainya dan pengetahuan juga keterampilan yang mencakupi serta ino yang bermanfaat buat memajukan kehidupan mereka (Friedman, 1979 dalam Kasim,2006:47).

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Undang-undang di Indonesia yang mengatur terkait anggaran belanja pemerintah bidang kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar gaji, sementara besar anggaran pada bidang kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.

Menurut Todaro (2003) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan adalah guna memenuhi salah satu hak dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan yang merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang bisa menyelesaikan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah juga bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, Kemudian menerapkannya dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa (Kahang, 2016).

4. Upah Minimum Provinsi (UMP)

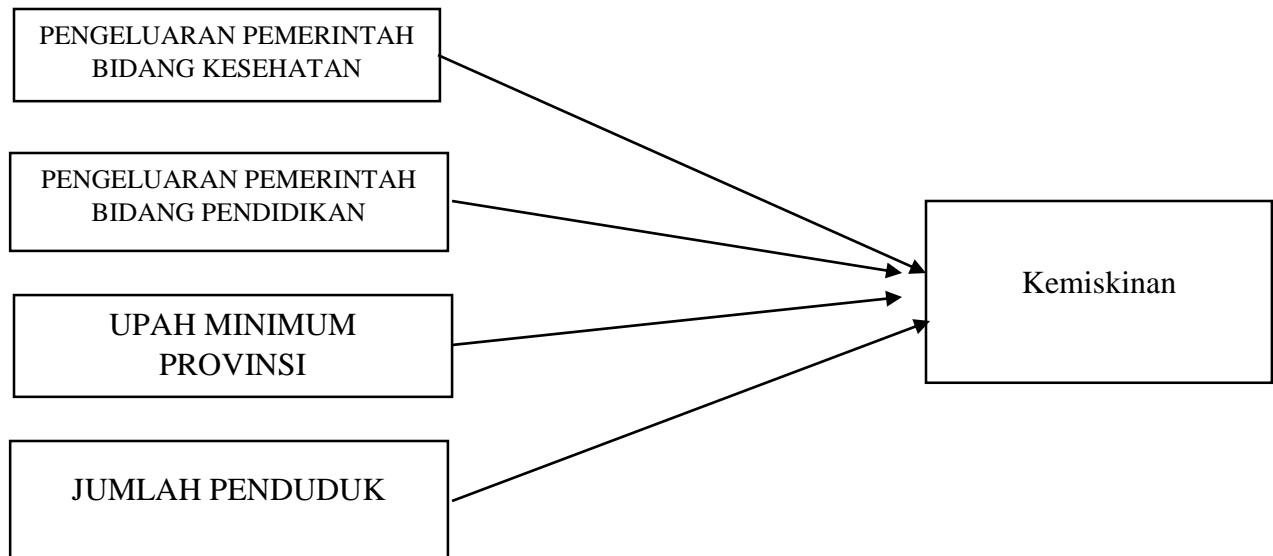
Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian

kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah (Febrika, 2016).

5. Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. menurut Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk adalah orang atau kelompok yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau memiliki KK (Kartu Keluarga). Seseorang atau kelompok yang tinggal di dalam wilayah negara Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Dalam penelitian yang di gunakan ini menggunakan objek penelitian kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Lampung, dimana dari total nya adalah 7 kabupaten (Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Waykanan) dan 2 kota (Bandar Lampung dan Metro).

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan data sekunder berupa *time-series* dalam bentuk tahunan selama periode 2010-2017, yang dimana data ini diperoleh dari pihak lain atau data yang sudah diolah oleh pihak ketiga secara berkala, data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan dari beberapa instansi lain yang terkait dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dikumpulkan dengan metode *library reseach* atau kepustakaan diantaranya menggunakan bahan-bahan kepustakaan ilmiah, jurnal, artikel, dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara pencatatan langsung dalam bentuk *time-series* pada tahun 2010-2017 yang diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

D. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) pengertian dari variable penelitian adalah metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

E. Metode Analisis Data Panel

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang bersifat bilangan atau data yang kualitatif yang diangkakan dapat digunakan untuk menaksir parameter. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi panel, sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan beberapa alat statistik antara lain Microsoft Excel dan Eviews7 untuk mengurangi human error. Analisis menggunakan regresi panel adalah gabungan antara deret waktu (time series data) dan (cross-section).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil uji Heteroskedastisitas, yang menunjukkan nilai probabilitas dari setiap variable independen (X) dikatakan tidak signifikan dengan tingkat 5 %. Hal ini menunjukkan adanya varian variabel yang sama atau tidak terdapat homoskedastisitas antara varian variabel independen terhadap residual setiap variabel. Berikut dapat dilihat hasil dari pengujian heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
LOG(PBK)	-0.011398	-0.228321	0.8201
LOG(PBP)	-0.091353	-1.730626	0.0881
LOG(UMP)	0.009589	0.134337	0.8935
LOG(JP)	0.053623	1.445168	0.1531

Sumber: Data Sekunder diolah 2019

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat nilai probabilitas setiap variabel independen yaitu kesehatan, pendidikan, upah minimum provinsi dan tenaga kerja yaitu > 0.05 maka dalam penelitian ini terbebas dari adanya masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinieritas

Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi parsial antar variabel independen, yaitu dengan menguji koefisien korelasi antar variabel independen. Suatu model yang baik tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dengan dependennya (Gujarati, 2012). Berikut ini hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.2
Hasil Uji Multikolinieritas

	LOG(PBK)	LOG(PBP)	LOG(UMP)	LOG(JP)
LOG(PBK)	1.000000	0.601886	0.799503	0.306585
LOG(PBP)	0.601886	1.000000	0.357686	0.796447
LOG(UMP)	0.799503	0.357686	1.000000	0.043338
LOG(JP)	0.306585	0.796447	0.043338	1.000000

Sumber: Data Skunder diolah 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 5.2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah pada multikolinieritas antar variabel independen yang digunakan. Dikarenakan tidak terdapat koefisien antar variabel independen yang > 0.9 .

B. Pemelihan Model Analisis Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis uji Chow adalah:

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 5.3
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<i>Cross-section F</i>	118.285348	(8,59)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	204.155044	8	0.0000

Sumber: Data Skunder diolah 2019

Berdasarkan uji Chow pada Tabel 5.3, menunjukkan bahwa probabilitas *Cross-section F* dan *Chi-Square* $< 0,05$ sehingga menolak H0. Jika berdasarkan uji Chow, model yang tepat dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan model *Fixed Effect*. Berdasarkan uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian pemilihan model akan berlanjut ke uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan penggunaan model yang akan dipakai antara *Random Effect* atau *Fixed Effect*. Hipotesis uji Hausman:

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 5.4
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.
<i>Cross-section Random</i>	13.222828	4	0.0102

Sumber: Data Skunder diolah 2019

Uji Hausman pada Tabel 5.4 diatas, menunjukkan bahwa probabilitas *cross section random* yaitu $0.0000 < 0,05$ maka menolak H0. Sehingga berdasarkan uji Hausman yang

telah dilakukan, model yang paling baik atau tepat digunakan untuk pengujian data panel adalah dengan model efek tetap (*Fixed Effect*).

C. Hasil Estimasi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik yang telah dilakukan, maka didapat hasil bahwa model terbaik yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect*. Maka hasil dari estimasi data panel adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5
Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Model <i>Fixed Effect</i>
Konstanta	14.15773
Standar error	3.531720
Probabilitas	0.0002
LOG(PBK)	-0.072078
Standar error	0.035886
Probabilitas	0.0492
LOG(PBP)	-0.096283
Standar error	0.043091
Probabilitas	0.0293
LOG(UMP)	-0.118285
Standar error	0.059005
Probabilitas	0.0496
LOG(JP)	0.074850
Standar error	0.294984
Probabilitas	0.8006
Adjusted R²	0.994334
F-statistik	1039.411
Probabilitas	0.000000
Durbin-Watson stat	0.977493

Sumber: Data Skunder diolah 2019

β_0 = Nilai 14.15773 dapat diartikan bahwa jika semua variable independen (Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk) dianggap bernilai nol maka Tingkat Kemiskinan sebesar 14.15773.

$\beta_1 = \text{Nilai} - 0.072078$ dapat diartikan bahwa jika Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan naik 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.072078 poin dengan asumsi variable lain dianggap tetap.

$\beta_2 = \text{Nilai} - 0.096283$ dapat diartikan bahwa jika Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan naik 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.096283 poin dengan asumsi variable lain dianggap tetap.

$\beta_3 = \text{Nilai} - 0.118285$ dapat diartikan bahwa jika Upah Minimum Provinsi naik 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.118285 poin dengan asumsi variable lain dianggap tetap.

$\beta_4 = \text{Nilai} 0.074850$ dapat diartikan bahwa jika Jumlah Penduduk naik 1 persen, maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0.074850 poin dengan asumsi variable lain dianggap tetap.

D. Uji Statistik/ Signifikansi

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji statistik koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil regresi model *Fixed Effect*, variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan pada 9 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung periode 2010-2017 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.994334. Hal ini berarti 99% variabel bebas tersebut dapat menjelaskan kemiskinan sebagai variabel dependen. Sedangkan (R^2) sisanya yaitu sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar penelitian.

2. Uji Statistik F

Uji F dilakukan bertujuan guna mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel dependen. Hasil estimasi dengan model *Fixed Effect* diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 dimana signifikan pada taraf signifikan 5% atau < 0.05 artinya secara bersama-sama variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, upah minimum provinsi, dan jumlah penduduk berpengaruh dan signifikan terhadap variabel kemiskinan pada 9 kabupaten di Provinsi Lampung periode 2010-2017.

3. Uji Statistik T

Uji t-statistik bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 5.6
Hasil Uji t-statistik

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
LOG(PBK)	-0.072078	-2.008509	0.0492
LOG(PBP)	-0.096283	-2.234436	0.0293
LOG(UMP)	-0.118285	-2.004676	0.0496
LOG(JP)	0.074850	0.253744	0.8006

Sumber: Data Sekunder diolah 2019

Berdasarkan Tabel 5.8 dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.0492. Kemudian pada variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.0293. Pada variabel upah minimum provinsi dapat diperoleh bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas

0.0496. Sedangkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.8006.

E. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan.

Variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.0492. Berdasarkan uji statistik diperoleh hasil bahwa koefisien pengeluaran pemerintah bidang kesehatan nilainya sebesar -0.072078, hal ini menunjukkan jika pengeluaran pemerintah bidang kesehatan naik 1% maka dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0.072 %.

Penelitian ini sesuai dengan yang di lakukan oleh Strauss dan Thomas (1995) berpendapat bahwa ada keterkaitan yang kuat antara kesehatan dengan kemiskinan. Kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, semakin besar kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, penelitian yang di lakukan Novita (2018) pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negative dan signifikan. Langkah pemerintah sudah tepat dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, karena jika seseorang mempunyai kesehatan yang bagus maka akan meningkatkan produktifitas kerja nya. Menurun nya tingkat produktifitas kerja seseorang maka akan dapat menimbulkan kerja yang kurang efektif dan akan berdampak pada kemiskinan.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan.

Pada variable pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.0293. Dengan nilai koefisien sebesar -0.096283, maka jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan naik

1% dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0.096 %. Dengan demikian, apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat maka kemiskinan akan menurun.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Todaro (2003) menyatakan bahwa pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Orang yang berpendidikan cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik. Selain itu, penelitian yang dilakukan Wahyudi (2011) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Dengan demikian orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih kecil untuk menjadi miskin dibanding mereka yang berpendidikan rendah.

3. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan.

Pengaruh upah minimum provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.0496. Dan nilai koefisien upah minimum provinsi sebesar -0.118285, maka jika upah minimum provinsi naik sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.11 %.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Stevans dan Sessions (2001) yang menyatakan bahwa upah minimum mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat kemiskinan. Jika upah minimum meningkat, maka tingkat kemiskinan akan turun. Kaufman (2000) menyebutkan bahwa meningkatkan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan. Tujuan dari diberlakukannya upah minimum provinsi yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan di atas garis kemiskinan telah tepat karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan.

Pada variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 0.074850, hal ini berarti jika jumlah penduduk naik sebesar 1% dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.074 %. Namun jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas 0.8006.

Hal ini tentu saja tidak efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan tenaga kerja guna mengatasi kemiskinan, karena jika jumlah tenaga kerja banyak dan lapangan kerja pun sedikit maka hanya akan menambah jumlah pengangguran yang akan menyebabkan kemiskinan. Hasil serupa juga di jumpai pada penelitian yang dilaksanakan oleh Irhamni (2017) yang mengatakan hal ini terjadi karena kenaikan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula menambah beban perekonomian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat prospek pengurangan kemiskinan dan pembangunan menjadi semakin jauh.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Tingkat Kemiskinan pada 9 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung tahun 2010-2017, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Lampung. Artinya, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan meningkat maka kemiskinan akan menurun. Tingkat kesehatan bagi seseorang sangatlah penting, karena semakin sehat seseorang akan meningkatkan produktivitas kinerjanya sehingga seseorang dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Lampung. Artinya, apabila pengeluaran pemerintah bidang pendidikan meningkat, maka kemiskinan akan menurun. Tingkat pendidikan bagi seseorang sangatlah penting, karena semakin tinggi Pendidikan yang didapat maka pengetahuan dan kreatifitas akan bertambah untuk akhirnya memiliki bekal bersaing dalam mencari pekerjaan yang lebih baik supaya terhindar dari kemiskinan.
3. Upah minimum provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Lampung. Artinya, apabila upah minimum provinsi meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Besarnya upah minimum provinsi sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di daerah Lampung, karena semakin tinggi tingkat upah yang di dapat maka akan dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Hal tersebut jelas akan meningkatkan kinerja untuk mendapatkan upah yang akan memajukan daerah.
4. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan terhadap penelitian ini dan beberapa kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Lebih efektif dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Selain itu pemerintah harus lebih efisien dalam menetapkan upah minimum provinsi agar tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan
2. Memfokuskan anggaran untuk meningkatkan anggaran ke bidang kesehatan dan pendidikan untuk menurunkan jumlah penduduk kemiskinan. Sektor kesehatan ada kartu sehat yang dapat digunakan oleh penduduk yang masih kurang mampu untuk mengatasi penyakit yang mereka hadapi.
3. Pemerintah diharapkan menetapkan upah minimum provinsi yang layak supaya penduduk yang bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak supaya kemiskinan akan semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, Meylins. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 2007-2008. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 1(1), 77-102.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2019. *Data dan Informasi Presentase Penduduk Miskin 2005-2018*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2019. *Data dan Informasi Jumlah Penduduk 2011-2018*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2018. *Data Statistik Presentase Penduduk Miskin*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik.
- Barros, A.R. dan Athias, D. 2013. *Minimum wages, poverty alleviation income policies, and the relative performance of the Northeastern economy in Brazil*. Sao Paulo. *Rev. Economics Politic* Vol. 33 (1)
- Basuki, A.T. dan Yuliadi, I. 2015. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Matan.
- Basuki, A.T. dan Prawoto, N. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung. <https://disnakertrans.lampungprov.go.id> diakses tanggal 29 Agustus 2019.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. www.djpk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 29 Agustus 2019
- Febrika, N. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa. *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gujarati, D. P. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gupta, S., Verhoeven, M., and Tiongson, E. R. 2002. The Effectiveness of Government Spending On Education and Health Care In Developing and Transition Economies. *European Journal of Political Economic*, Elsevier Vol. 18 (4), 717-737.
- Hjelm, J.R. 2010. *The Dimensions of Health: Conceptual Models*. Jones & Bartlett Publishers.
- Hudiyanto. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cetakan Linkar Media.
- Ihsan, K. dan Ikhsan. 2018. Analisis pengaruh UMP, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 (3).

- Kahang, M., Saleh, M., dan Suharto, R.B. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Tmur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 18(2).
- Kasim, M. 2006. *Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia & Strategi Penanggulangannya*. Indomedia. Jakarta.
- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. 2000. *The Economic of Labor Markets*. Dryden Press.
- Kurniawan, Acep. 2018. Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1 (1), 1 – 29.
- Mardiana., Militina, T., dan Utary, A.R. 2017. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Inovasi*, Vol. 13(1), 50-60
- Marini, T. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol. 12 (1).
- Mudrajat, K. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nalle, F.W dan Kiha, E.K, 2018 “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)” *JDEP Vol. 1 No. 3*: hlm.35-45
- Nasution, M. 1994. *Manajemen Personalialia*. Djambatan. Jakarta.
- Novita, I. S. 2018. Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014. *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 7 (2).
- Nurkholis. 2013. Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 (1).
- Ramirez, C., Pensa, R., Mogensen, A. 2015. *The Effect of Minimum Wage on Poverty*. Georgia Institute of Technology. *In USA*.
- Raghbendra, J. 2001. An Empirical Analysis of the Impact of Public Expenditures On Education and Health On Proverty in Indian States. *Journal of Economic Studies*. Kingston University, Canada.
- Sihombing, R.S. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi Dalam Negeri, dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal ekonomi*, Vol. 7 (4).
- Putu, S. P. S., dan Ketut, S. 2014. PDRB Per Kapita, Pendidikan, dan Produktifitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 10

- Strauss, J., & Thomas, D. 1995. *Human resources: Empirical modeling of household and family decisions*. Handbook of development economics, 3, 1883-2023.
- Stevans, L. K., & Sessions, D. N. 2001. *Minimum Wage Policy and Poverty in the United States*. International Review of Applied Economics, 15(June), 65–75.
- Sudarwati, N. 2009. *Kebijakan Pengetasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Intimedia. Malang.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Grafindo persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Thuku, G. K., Paul, G., and Almadi, O. 2013. The Impact of Population Change on Economic Growth in Kenya. *International Journal of Economics and Management Sciences, Vol 2 (6)*.
- Todaro, dan Michael, P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga, Edisi ke 7.
- Todaro, M. P., dan Stephen, C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyudi. 2011. Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan. *Tesis S2*. Jakarta: Universitas Indonesia.

[Www.desnantara-tamasya.blogspot.com](http://www.desnantara-tamasya.blogspot.com). Peta Provinsi Lampung.

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Zulkhan Chrisna Adi Setiawan

Nomor Mahasiswa : 20150430113

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.

Yogyakarta, 14 Oktober 2019



Zulkhan Chrisna Adi Setiawan